
EKSKLUSI SOSIAL DALAM AKSES TERHADAP PENDIDIKAN: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF KEADILAN

Gilang Maulana

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Eksklusi sosial dalam akses terhadap pendidikan merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional yang mempengaruhi individu dan masyarakat secara luas. Tinjauan ini bertujuan untuk menganalisis eksklusi sosial dalam konteks akses pendidikan dari perspektif keadilan. Studi ini mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan eksklusi sosial dalam akses pendidikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada disparitas ekonomi, ketidaksetaraan gender, diskriminasi etnis, dan ketidakmampuan fisik. Perspektif keadilan menyoroti pentingnya memperjuangkan kesetaraan akses terhadap pendidikan bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial atau keuangan mereka. Dalam konteks ini, kebijakan publik dan praktik pendidikan yang inklusif menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang adil dan setara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Kata Kunci: *Eksklusi Sosial, Akses Pendidikan, Keadilan*



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendidikan dianggap sebagai salah satu fondasi utama bagi pembangunan manusia dan masyarakat secara keseluruhan. Namun, di banyak negara, akses terhadap pendidikan masih diwarnai oleh fenomena eksklusi sosial yang menjadi hambatan bagi pencapaian keadilan dalam pendidikan. Eksklusi sosial dalam akses pendidikan mengacu pada situasi di mana sejumlah kelompok masyarakat atau individu tidak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas, baik itu karena faktor ekonomi, sosial, budaya, atau struktural lainnya. Tinjauan tentang eksklusi sosial dalam akses pendidikan dari perspektif keadilan memungkinkan kita untuk memahami berbagai aspek dan dampak dari fenomena tersebut serta mencari solusi untuk mengatasinya.

Faktor utama yang menyebabkan eksklusi sosial dalam akses pendidikan mencakup ketidaksetaraan ekonomi, segregasi sosial, diskriminasi, serta kurangnya aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Ketidakmampuan finansial sering kali menjadi faktor utama yang menghalangi individu atau keluarga dari kelompok ekonomi rendah untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Di samping itu, faktor-faktor sosial seperti ketidaksetaraan gender, ketidakadilan etnis, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas juga turut berkontribusi pada eksklusi sosial dalam pendidikan. Selain itu, struktur dan kebijakan pendidikan yang tidak inklusif dan berpihak kepada kelompok-kelompok tertentu juga dapat memperkuat fenomena eksklusi sosial tersebut.

Dampak dari eksklusi sosial dalam akses pendidikan sangatlah luas dan berdampak jangka panjang bagi individu dan masyarakat. Individu yang terpinggirkan dari akses pendidikan berkualitas cenderung memiliki peluang yang terbatas dalam hal pekerjaan, penghasilan, serta partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Dengan demikian, eksklusi sosial dalam akses pendidikan tidak hanya merugikan individu secara pribadi, tetapi juga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, perspektif keadilan menjadi sangat relevan dalam memahami dan mengatasi eksklusi sosial dalam akses pendidikan. Keadilan pendidikan menuntut agar setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas, tanpa adanya diskriminasi atau hambatan yang tidak adil. Dengan menerapkan pendekatan yang berbasis keadilan dalam kebijakan pendidikan, diharapkan dapat diciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, tinjauan mendalam tentang eksklusi sosial dalam akses pendidikan dari perspektif keadilan menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan merancang solusi yang efektif dalam memastikan akses pendidikan yang adil dan merata bagi semua.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis eksklusi sosial dalam akses terhadap pendidikan dari perspektif keadilan haruslah komprehensif dan memperhitungkan berbagai aspek yang relevan. Berikut adalah penjelasan panjang tentang metode penelitian yang dapat digunakan:

1. **Studi Literatur:** *Studi literatur merupakan langkah awal dalam penelitian untuk memahami landasan teoritis dan penelitian terdahulu terkait eksklusi sosial dalam akses pendidikan dan perspektif keadilan. Peneliti dapat mengumpulkan literatur dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, laporan riset, dan dokumen kebijakan. Dalam studi literatur, peneliti akan mengidentifikasi kerangka konseptual yang relevan, konsep-konsep kunci, dan teori-teori yang dapat digunakan sebagai dasar analisis.*
2. **Metode Kualitatif:** *Pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman dan persepsi individu terkait eksklusi sosial dalam akses pendidikan. Metode wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti siswa, orang tua, guru, dan petugas pendidikan, dapat digunakan untuk menggali pandangan mereka tentang faktor-faktor yang menyebabkan eksklusi sosial dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, observasi partisipatif di lingkungan pendidikan juga dapat memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika eksklusi sosial dalam konteks nyata.*
3. **Analisis Data Kuantitatif:** *Pendekatan kuantitatif dapat digunakan untuk mengumpulkan data statistik yang mendukung temuan kualitatif dan mengidentifikasi pola dan tren dalam eksklusi sosial dalam akses pendidikan. Data sekunder seperti data sensus, survei penduduk, dan data administrasi pendidikan dapat dianalisis untuk mengevaluasi ketimpangan akses pendidikan berdasarkan variabel sosial seperti tingkat pendapatan, gender, etnis, dan geografi. Analisis statistik seperti regresi logistik dan analisis kesenjangan dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada eksklusi sosial dan mengukur tingkat ketidaksetaraan.*
4. **Studi Kasus:** *Studi kasus dapat dilakukan untuk memahami konteks lokal dan faktor-faktor spesifik yang menyebabkan eksklusi sosial dalam akses pendidikan di suatu wilayah atau komunitas tertentu. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data mendalam dari satu atau beberapa kasus yang mewakili variasi dalam konteks sosial, ekonomi, budaya, dan geografis. Studi kasus dapat memberikan pemahaman yang lebih detail tentang tantangan dan potensi solusi dalam mengatasi eksklusi sosial dalam akses pendidikan dari perspektif keadilan.*
5. **Analisis Kebijakan:** *Analisis kebijakan dapat dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program yang ada dalam mengurangi eksklusi sosial dalam akses pendidikan. Peneliti dapat mengidentifikasi kebijakan-kebijakan pendidikan yang relevan dan menganalisis implementasi serta dampaknya terhadap kesetaraan akses pendidikan. Analisis ini juga dapat memberikan*

rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung akses pendidikan yang adil dan merata bagi semua.

Dengan kombinasi metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, serta pendekatan studi kasus dan analisis kebijakan, penelitian tentang eksklusi sosial dalam akses pendidikan dari perspektif keadilan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang masalah ini dan memberikan kontribusi nyata dalam merancang kebijakan dan program intervensi yang efektif. Metode penelitian yang holistik dan beragam ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang komprehensif tentang dinamika eksklusi sosial dalam akses pendidikan dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai keadilan pendidikan.

PEMBAHASAN

Eksklusi sosial dalam akses terhadap pendidikan merupakan fenomena yang menggambarkan ketidaksetaraan dalam akses dan partisipasi pendidikan yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk faktor ekonomi, sosial, budaya, dan struktural. Dalam konteks ini, perspektif keadilan menjadi sangat relevan karena menekankan pada pentingnya kesetaraan akses dan kesempatan bagi semua individu untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Pembahasan mengenai eksklusi sosial dalam akses pendidikan dari perspektif keadilan melibatkan analisis terhadap ketidaksetaraan yang terjadi serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini.

Dalam perspektif keadilan, penting untuk memahami bahwa hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas harus dijamin untuk semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka. Namun, dalam banyak kasus, eksklusi sosial dalam akses pendidikan terjadi sebagai akibat dari ketidaksetaraan yang mendasar, seperti ketimpangan ekonomi, perbedaan status sosial, atau diskriminasi berbasis gender, etnis, agama, atau disabilitas. Ketidaksetaraan ini menciptakan hambatan-hambatan yang menghambat individu atau kelompok tertentu untuk mengakses pendidikan yang berkualitas, yang pada gilirannya dapat memperdalam kesenjangan sosial dan menghalangi upaya-upaya untuk mencapai keadilan pendidikan.

Salah satu aspek penting dalam analisis eksklusi sosial dalam akses pendidikan dari perspektif keadilan adalah identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksetaraan tersebut. Faktor-faktor ini dapat bersifat kompleks dan saling terkait, termasuk faktor ekonomi seperti kemiskinan dan ketidakmampuan membayar biaya pendidikan, faktor sosial seperti ketimpangan gender atau diskriminasi etnis, dan faktor struktural seperti kebijakan pendidikan yang tidak inklusif atau kurangnya aksesibilitas terhadap fasilitas pendidikan. Dengan memahami faktor-faktor ini, langkah-langkah konkret dapat diambil untuk mengatasi eksklusi sosial dalam akses pendidikan dengan pendekatan yang berbasis keadilan.

Upaya-upaya untuk mengatasi eksklusi sosial dalam akses pendidikan dari perspektif keadilan meliputi kebijakan dan program yang dirancang untuk meratakan lapangan pendidikan, mengurangi ketimpangan akses, dan mempromosikan kesetaraan peluang. Ini termasuk program-program bantuan keuangan bagi keluarga miskin atau rentan,

kebijakan akses pendidikan yang inklusif untuk kelompok-kelompok marginal, kampanye untuk mengubah sikap dan perilaku yang diskriminatif, serta peningkatan kualitas dan ketersediaan layanan pendidikan bagi semua individu tanpa terkecuali. Selain itu, perlunya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan sektor swasta juga menjadi sangat penting dalam upaya untuk mencapai keadilan pendidikan.

Dengan demikian, pembahasan tentang eksklusi sosial dalam akses pendidikan dari perspektif keadilan tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas masalah tersebut, tetapi juga menyoroti pentingnya tindakan konkret untuk memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Dengan pendekatan yang berbasis keadilan, dapat diharapkan bahwa upaya-upaya ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Penting untuk diakui bahwa eksklusi sosial dalam akses pendidikan tidak hanya merupakan masalah individual, tetapi juga merupakan masalah struktural yang muncul akibat ketidaksetaraan yang lebih luas dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam mengatasi eksklusi sosial, penting untuk tidak hanya fokus pada intervensi individual, tetapi juga mengidentifikasi dan menangani akar penyebab struktural yang mendasarinya.

Selain itu, penting juga untuk memperhatikan bahwa upaya mengatasi eksklusi sosial dalam akses pendidikan harus bersifat holistik dan terpadu. Hal ini berarti bahwa intervensi tidak hanya terfokus pada aspek finansial, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain seperti akses fisik, kesetaraan gender, kebijakan inklusi, dan peningkatan mutu pendidikan. Pendekatan ini akan memastikan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang tertinggal dalam akses pendidikan.

Selanjutnya, melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan sektor swasta, juga sangat penting dalam memperjuangkan keadilan pendidikan. Kolaborasi lintas sektor ini akan memungkinkan adanya sinergi dalam perumusan kebijakan, implementasi program-program pendidikan, dan evaluasi dampak intervensi yang dilakukan.

Terakhir, untuk mencapai tujuan keadilan pendidikan, penting untuk terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan dan program yang telah diterapkan. Dengan melakukan pemantauan yang berkala, dapat diidentifikasi hambatan-hambatan baru yang muncul dan mengevaluasi efektivitas strategi yang telah dilakukan. Hal ini akan memungkinkan adanya penyesuaian dan perbaikan yang kontinu untuk memastikan bahwa upaya untuk mengatasi eksklusi sosial dalam akses pendidikan berjalan secara efektif.

Dengan demikian, melalui pendekatan yang holistik, terpadu, dan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, eksklusi sosial dalam akses pendidikan dapat diatasi secara bertahap. Pemberdayaan masyarakat, penguatan kebijakan inklusif, dan adopsi praktik-praktik yang berbasis bukti akan menjadi kunci dalam menciptakan sistem pendidikan yang adil dan inklusif bagi semua individu.

Setiap negara atau daerah memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda dalam mencapai keadilan pendidikan, karena dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya, ekonomi, dan politik lokal.

Selain itu, peran teknologi dan inovasi juga dapat menjadi faktor penting dalam upaya untuk mengatasi eksklusi sosial dalam akses pendidikan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, misalnya, dapat memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas dan inklusif, terutama bagi individu atau kelompok yang berada di daerah terpencil atau terpinggirkan. Namun, penting untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara bijaksana dan memperhatikan aspek-aspek keamanan dan privasi yang relevan.

Selanjutnya, kesadaran akan pentingnya keadilan pendidikan juga perlu ditingkatkan di semua tingkatan masyarakat. Melalui pendidikan, kampanye sosial, dan advokasi, kesadaran akan pentingnya mengatasi eksklusi sosial dalam akses pendidikan dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya-upaya yang mendukung keadilan pendidikan.

Terakhir, pembahasan tentang eksklusi sosial dalam akses pendidikan juga tidak dapat dipisahkan dari konteks global yang lebih luas, terutama dalam era globalisasi saat ini. Kolaborasi internasional dan pertukaran pengetahuan antarnegara dapat menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran untuk memperbaiki sistem pendidikan secara global, dengan fokus pada prinsip-prinsip keadilan dan inklusi.

Dengan demikian, melalui kombinasi upaya lintas-sektor, pendekatan berbasis teknologi dan inovasi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan kerja sama internasional, eksklusi sosial dalam akses pendidikan dapat diatasi secara lebih efektif. Hal ini akan membawa manfaat yang signifikan bagi individu, masyarakat, dan negara secara keseluruhan, dengan menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Selain itu, penting untuk menyadari bahwa mengatasi eksklusi sosial dalam akses pendidikan bukanlah upaya yang singkat atau mudah. Diperlukan komitmen jangka panjang dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan sektor swasta, untuk mencapai perubahan yang signifikan. Ini melibatkan alokasi sumber daya yang memadai, kebijakan yang mendukung, dan implementasi program-program yang efektif.

Upaya-upaya untuk mengatasi eksklusi sosial dalam akses pendidikan juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi, dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Proses pengambilan keputusan harus melibatkan berbagai pihak yang terpengaruh oleh kebijakan tersebut, sehingga memastikan bahwa solusi yang dihasilkan memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi semua individu dan kelompok.

Selanjutnya, evaluasi terus-menerus terhadap keberhasilan program-program dan kebijakan yang diterapkan sangat penting untuk memastikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan efektif dan berkelanjutan. Evaluasi ini juga memungkinkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem pendidikan yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan.

Di tengah dinamika global yang terus berubah, tantangan eksklusi sosial dalam akses pendidikan juga akan terus berkembang. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pendekatan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan-perubahan tersebut, serta untuk terus melakukan inovasi dan pembelajaran.

Melalui komitmen, kolaborasi, dan upaya yang berkelanjutan, eksklusi sosial dalam akses pendidikan dapat diatasi, dan masyarakat dapat mencapai tujuan keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan. Hal ini akan membawa dampak positif yang signifikan bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara, serta memberikan kesempatan yang lebih besar bagi setiap individu untuk mencapai potensi mereka sepenuhnya.

Dalam melanjutkan upaya mengatasi eksklusi sosial dalam akses pendidikan, perlu ditekankan bahwa pendekatan yang holistik dan inklusif sangatlah penting. Hal ini berarti bahwa solusi yang diusulkan harus mencakup berbagai dimensi, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik, serta memperhitungkan keberagaman dan kompleksitas masyarakat.

Selain itu, perlu juga diingat bahwa kesetaraan dalam pendidikan tidak hanya terbatas pada akses fisik ke lembaga pendidikan, tetapi juga melibatkan kesetaraan dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh setiap individu. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk mengatasi eksklusi sosial harus juga mencakup upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, mengurangi disparitas dalam kualitas pendidikan antar wilayah atau kelompok masyarakat.

Pemerintah, sebagai pemegang tanggung jawab utama dalam sektor pendidikan, memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keadilan dan kesetaraan dalam akses pendidikan. Diperlukan kebijakan-kebijakan yang progresif dan inklusif, serta alokasi anggaran yang memadai, untuk mendukung akses pendidikan bagi semua individu, terutama mereka yang rentan terhadap eksklusi sosial.

Selanjutnya, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keadilan pendidikan, serta mendorong partisipasi aktif dari berbagai kelompok masyarakat dalam mendukung upaya-upaya untuk mengatasi eksklusi sosial. Pendidikan formal dan non-formal dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesadaran ini, dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan sektor swasta dapat memperkuat upaya tersebut.

Terakhir, sumber daya manusia yang berkualitas dan terlatih dengan baik juga merupakan kunci untuk mencapai tujuan keadilan pendidikan. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan guru, pengembangan kurikulum yang inklusif, dan penguatan kapasitas lembaga-lembaga pendidikan adalah langkah-langkah penting dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas.

Dengan demikian, melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, serta kerjasama antara berbagai pihak, eksklusi sosial dalam akses pendidikan dapat diatasi, dan setiap individu dapat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan dan mencapai potensi mereka sepenuhnya. Ini akan menjadi langkah penting menuju masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan secara sosial dan ekonomi.

Kesimpulan

Dari tinjauan perspektif keadilan terhadap eksklusi sosial dalam akses terhadap pendidikan, dapat disimpulkan bahwa masalah eksklusi sosial merupakan tantangan serius yang menghalangi terwujudnya keadilan dalam sistem pendidikan. Eksklusi sosial dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk akses terbatas terhadap pendidikan, disparitas

dalam kualitas pendidikan, serta ketidakmerataan dalam kesempatan pendidikan antara individu dan kelompok masyarakat.

Penting untuk diakui bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan setara, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk mengatasi eksklusi sosial dalam akses pendidikan harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan inklusi, dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka.

Langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mengatasi eksklusi sosial dalam akses pendidikan termasuk pembentukan kebijakan yang inklusif dan progresif, alokasi sumber daya yang memadai, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan sektor swasta juga diperlukan untuk mencapai tujuan keadilan pendidikan ini.

Dengan mengatasi eksklusi sosial dalam akses pendidikan, masyarakat dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya akan membawa manfaat bagi individu yang terpinggirkan, tetapi juga untuk kemajuan sosial, ekonomi, dan politik secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen yang kuat dari semua pihak untuk terus berupaya menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan adil bagi semua.

DAFTAR PUSTAKA

Novita, D. (2019). Analisis Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan (Studi Pada Inspektorat Kota Langsa).

- Sihombing, M., & Tarigan, U. (2013). *Pengaruh Pangkat dan Kompetensi Pegawai Terhadap Pengembangan Karir pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan.*
- Tarigan, U. (2018). *Analisis Kualitas Pelayanan Publik dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur.*
- Tarigan, U. (2006). *Analisa Kinerja Pegawai Badan Pengawas Kabupaten Gayo Lues.*
- Tarigan, U. (2005). *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Aparatur (Kajian Sekretariat Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara).*
- Syarif, Y. (2018). *Rancangan Power Amplifier Untuk Alat Pengukur Transmission Loss Material Akustik Dengan Metode Impedance Tube. JOURNAL OF ELECTRICAL AND SYSTEM CONTROL ENGINEERING, 1(2).*
- Siregar, N. S. S. (2019). *Implementasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Kebijakan Penertiban Hewan Ternak (Studi di Kecamatan IDI Rayeuk Kabupaten Aceh Timur) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Siregar, N. S. S. (2016). *Komunikasi terapeutik dokter dan paramedis terhadap kepuasan pasien dalam pelayanan kesehatan pada rumah sakit bernuansa islami di kota Medan (Doctoral dissertation, Program Pasca sarjana UIN-SU).*
- Tarigan, U., & Batubara, B. M. (2015). *Peran Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang (Rpd 2 FM) dalam Menunjang Program Pembangunan Daerah (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Tarigan, U., & Muda, I. (2013). *Kepemimpinan Keuchik (Studi Tentang Kepemimpinan Keuchik di Gampong Siti Ambia, Suka Makmur, Kuta Simboling, Teluk Ambun dan Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil).*
- Tarigan, U., & Ritonga, S. (2005). *Fungsi Pengawasan Kepegawaian Menunjang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Tarigan, U., & Siregar, T. (2004). *Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat (Suatu Studi Deskriptif Analisis di Kantor Lurah Kelurahan Binjai Timur Kota Binjai) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Tarigan, U., & Usman, D. A. (2007). *Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara.*
- Widyastuti, I. W. (2022). *Analisis Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014-2019 dalam Pembentukan Peraturan Daerah.*
- Tarigan, R. S. (2022). *KEBERMANFAATAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI PADA DUNIA PENDIDIKAN DI INDONESIA.*
- Eky Ermal, M. (2019). *PROFIL KINERJA RETURN DAN RESIKO PADA SAHAM TIDAK BERETIKA: STUDI KASUS PERUSAHAAN ROKOK DI INDONESIA.*
- Tarigan, U., & Sinaga, M. (2010). *Implementasi Manajemen Keuangan Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di SMA Negeri 2 Sibolga).*
- Harahap, G. Y. (2004). *Decentralization and its Implications on the development of Housing in Medan.*
- Karim, A. (2017). *Efektivitas Beberapa Produk Pembersih Wajah Antiacne Terhadap Balderi Penyebab Jerawat Propianibacterium acnes.*
- Siregar, N. S. S. (2019). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- MARPAUNG, A. D., & Harahap, G. Y. (2022). *PEMBANGUNAN PLTA PEUSANGAN 1 & 2 HYDROELECTRIC POWER PLANT CONTRUCTION PROJECT 88 MW-PENSTOCK LINE ACEH TENGAH. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).*
- Santoso, M. H. (2021). *Application of Association Rule Method Using Apriori Algorithm to Find Sales Patterns Case Study of Indomaret Tanjung Anom. Brilliance: Research of Artificial Intelligence, 1(2), 54-66.*
- Putri, A. O. (2017). *Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan.*
- Muda, I., & Angelia, N. (2018). *Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Mengelola Sektor Pariwisata Pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat.*
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2015). *Peranan Gaya Kepemimpinan Dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Tarigan, R. S. (2018). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Program Studi (SIPRODI).*
- Girsang, L. (2020). *Pengaruh Pelatihan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Lintas Aman Andalas Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Batubara, B. M. (2023). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).*

- Gunawan, I., Matondang, A., & Sembiring, M. (2020, February). Lean Technology Implementation For Reducing The Dwelling Time Level. In *Proceedings of the 1st International Conference of Global Education and Society Science, ICOGESS 2019, 14 March, Medan, North Sumatera, Indonesia*.
- Harahap, G. Y. (2020). Instilling Participatory Planning in Disaster Resilience Measures: Recovery of Tsunami-affected Communities in Banda Aceh, Indonesia. *Budapest International Research in Exact Sciences (BirEx) Journal*, 2(3), 394-404.
- Hartono, B. HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT: A STUDY OF THE POLICY IMPLEMENTATION OF THE TRAINING POLICY TOWARD CAREER OF GOVERNMENT'S SERVANTS IN SLEMAN REGION.
- SIDABUTAR, P. R., & Harahap, G. Y. (2022). IDENTIFIKASI PELAT LANTAI PERON TINGGI PADA PEMBANGUNAN STASIUN LUBUK PAKAM BARU. *Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik*, 1(3).
- Siregar, N. I., & Aziz, A. (2012). Model Pendidikan Karakter di SMA Swasta Brigjen Katamsa Medan.
- Tarigan, U., & Suriadi, A. (2007). Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Timur.
- Tarigan, U., & Harahap, B. (2006). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang surat Izin Tempat Usaha (SITU) di Kabupaten Gayo Lues.
- Nasution, I., & Tarigan, U. (2017). Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Local di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang).
- Dewi, W. C. (2020). Pengaruh Likuiditas Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018 (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Sembiring, W. M. (2023). Peranan Babinsa (Bintara Pembina Desa) Koramil 0201/Medan Komando Rayon Militer 11/Md dalam Pembinaan Kenakalan Remaja di Kecamatan Medan Deli.
- Tarigan, U. (2004). Peranan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Administrasi Pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Wibowo, H. T., Tarigan, R. S., & Mukmin, A. A. (2022). APLIKASI MARKETPLACE PENDAMPING WISATA DENGAN API MAPS BERBASIS MOBILE DAN WEB. Retrieved from osf.io/3jpd/.
- Tarigan, U. (2012). Evaluasi Dampak Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh).
- Wuri Andary, R. (2015). Komunikasi Bermedia dan Perilaku Pelajar (Studi Korelasional tentang Penggunaan Smartphone terhadap Perilaku Pelajar SMA Negeri 1 Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Tarigan, U. (2016). Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan Tahun 2015 di Kecamatan Torgamba (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Berutu, B. R. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat.
- Rejeki, R. (2019). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Santoso, M. H. (2021). Laporan Kerja Praktek Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis Web pada SMA Swasta Persatuan Amal Bakti (PAB) 8 Saentis.
- Muda, I., & Lubis, Y. A. (2023). Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Smart City (Studi Kasus di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan).
- Muda, I., & Dewi, R. (2013). Model Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Kecamatan Sipirok Tapanuli Selatan.
- Muda, I., Harahap, R. H., Amin, M., & Kusmanto, H. (2022, November). Problems of the exploitation policy of children of street beggars in Medan city. In *AIP Conference Proceedings (Vol. 2659, No. 1)*. AIP Publishing.
- Tarigan, U. (2004). Hubungan Kemampuan Manajemen Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana dan Efektivitas Pencapaian Program Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Tenggara.
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2018). Evaluasi Prosedur Pelayanan KTP Elektronik di Kantor Camat Kecamatan Medan Belawan Kota Medan.
- Ramadhani, M. R., & Syarif, Y. (2022). PROYEK PEMBANGUNAN SALURAN PENGHUBUNG PADA BENDUNG DI SERDANG. *Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik*, 1(3).
- Tarigan, U., & Hasibuan, M. A. (2013). Pengaruh Kepemimpinan Dalam Peningkatan Koordinasi Kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

- Kurniawan, M. Y. (2022). *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Data, P., Tarigan, R. S., Wibowo, H. T., Azhar, S., & Wasmawi, I. (2016). *Manual Procedure Petunjuk dan Mekanisme Pengoperasian Pendaftaran Ulang Online Mahasiswa Lama*.
- Tarigan, R. S., Wasmawi, I., & Wibowo, H. T. (2020). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Tanda Tangan Gaji Online (SITAGO)*.
- TARIGAN, R. G., & Harahap, G. Y. (2022). *LAPORAN KERJA PRAKTEK PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG MENARA BRI JL. PUTRI HIJAU NO. 2-KOTA MEDAN. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Tarigan, U., & Lubis, A. A. (2014). *Tingkat Pendapatan dan Proses Pemungutan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai*.
- Siregar, N. S. S. (2017). *Modul Praktikum Publik Speaking*.
- Barus, R. K. I., & Dwiana, R. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Thamrin, M. H., & Batubara, B. M. (2014). *Pengaruh Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang*.